KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222, Faksimile: (021) 525 3159
Laman: www.kemenkum.go.id, Pos-el: birosdm@kemenkum.go.id

Nomor : SEK.2-KP.06.04-352 15 Oktober 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penawaran Beasiswa *Master Degree Programmes* oleh Lee Kuan Yew School of Public Policy

Yth. 1. Kepala Biro dan Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal;
2. Sekretaris Unit Utama;
3. Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Kementerian Hukum
di tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-23/S/KTLN/LN.03.00/10/2026 tanggal 6 Oktober 2026 perihal Penawaran *Beasiswa Master Degree Programmes oleh* Lee Kuan Yew School of Public Policy, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) bagian dari National University of Singapore (NUS) yang menempati peringkat ke-10 dunia versi QS *World University Rankings* memberikan penawaran beasiswa untuk Tahun Akademik Agustus 2027 pada tiga program Magister berikut:
   a. ***Master in Public Administration*** **(MPA),** program 1 tahun;
   b. ***Master in Public Policy*** **(MPP),** program 2 tahun;
   c. ***Master in International Affairs*** **(MIA),** program 2 tahun.

   Informasi detail program studi dapat diakses melalui tautan berikut:
   https://lkyspp.nus.edu.sg
2. penerima beasiswa akan memperoleh **tiket pulang-pergi Jakarta-Singapura, biaya kuliah, uang saku bulanan, tunjangan kedatangan, tunjangan buku dan asuransi kesehatan**;
3. kriteria pengusulan pegawai yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum adalah sebagai berikut:
   a. merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif;
   b. untuk peminatan program MPA diutamakan pejabat setingkat Eselon III atau Jabatan Fungsional Madya dengan masa kerja di Kementerian Hukum paling sedikit 5 (lima) tahun;
   c. untuk peminatan program MPP dan MIA memiliki masa kerja sebagai PNS di Kementerian Hukum paling sedikit 2 (dua) tahun;
   d. tidak sedang diproses/menjalani hukuman disiplin;
4. persyaratan untuk mengajukan *endorsement* kepada Kementerian Sekretariat Negara di lingkungan Kementerian Hukum adalah sebagai berikut:
   a. surat usulan/rekomendasi dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal (*focal point*) yang ditujukan kepada Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara**;**
   b. ijazah dan transkrip akademik (termasuk deskripsi penilaian) dalam bahasa Inggris. Dokumen berbahasa lain wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah**;**
   c. *Curriculum Vitae* (CV) dalam bahasa Inggris yang memuat pencapaian akademik, profesional, dan personal, termasuk posisi signifikan yang pernah diemban (setiap jeda dalam riwayat pekerjaan wajib dijelaskan). Setiap jabatan wajib mencantumkan:
      1) organisasi dan periode (bulan dan tahun);

2) tanggung jawab utama;
3) nama dan jabatan atasan langsung;

d. sertifikat TOEFL iBT (termasuk *Home Edition*) atau IELTS *Academic* dengan skor yang diutamakan 100 (TOEFL iBT) atau 7.0 (IELTS). TOEFL ITP tidak dapat digunakan;
e. skor GRE/GMAT (opsional);
f. berkas tambahan sesuai program:
   1) MPA: *Personal Statement* (500 kata) dan struktur organisasi dalam bahasa Inggris;
   2) MPP: *Personal Statement* (500 kata);
   3) MIA: *Personal Statement* (600 kata) dan satu contoh tulisan sebelumnya dalam bahasa Inggris (maksimal 2.000 kata);

5. ketentuan lengkap setiap berkas wajib dibaca pada tautan berikut: https://lkyspp.nus.edu.sg/graduate-admissions/admission-guide/application-checklist, khususnya untuk program yang dipilih guna menghindari kesalahan dokumen dan prosedur;
6. setelah mendapatkan surat usulan/rekomendasi dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal selaku *focal point*, pegawai secara mandiri mengunggah seluruh dokumen melalui laman KTLN-*Scholar:* https://ktln-scholar.setneg.go.id/
7. selanjutnya, Kementerian Sekretariat Negara memproses *endorsement*. Setelah disetujui, daftar kandidat terpilih (*shortlist*) disampaikan kepada LKYSPP. Kandidat terpilih akan dihubungi dan dipandu oleh LKYSPP untuk mendaftar melalui laman LKYSPP dengan tenggat:
   1) MPA: paling lambat 31 Desember 2026;
   2) MPP dan MIA: paling lambat 15 Desember 2026;
8. LKYSPP menyampaikan pengumuman akhir penerima beasiswa kepada Kementerian Sekretariat Negara, selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara meneruskannya kepada instansi penerima beasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara/i dapat menginformasikan kepada pejabat/pegawai pada unit kerjanya dan mengusulkan pejabat/pegawai yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti beasiswa dimaksud melalui aplikasi Sisumaker Kementerian Hukum paling lambat tanggal **30 Oktober 2026** guna mendapatkan surat pengantar/rekomendasi dari *focal point*. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Inas (HP. 082122552508).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Sunu Tedy Maranto

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi